

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 119/DSN-MUI/II/2018
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BERDASARKAN
PRINSIP SYARI'AH
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Cabang
Jatimulyo Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

MURTIANA

NPM : 1621030386

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 119/DSN-MUI/II/2018
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Cabang
Jatimulyo Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

MURTIANA

NPM : 1621030386

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Fathul Mu'min, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pembiayaan Ultra mikro Syariah diperuntukkan bagi pelaku usaha Ultra mikro yang membutuhkan sekelompok barang atau jasa yang nilainya sangat kecil Ultra mikro dan beragam jenisnya guna untuk meningkatkan usaha ultra mikro. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan Ultra mikro yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, Lampung Selatan yakni jika nasabah menginginkan pembiayaan ultra mikro multi barang dapat menggunakan akad *Murabahah*. Prakteknya setelah menyelesaikan akad *Murabahah* maka nasabah mendapatkan sejumlah uang untuk membeli barang sendiri yang diinginkannya. Dalam pembelian barang di sini berlaku akad *wakalah*. Artinya dalam praktek pembiayaan ultra mikro multi barang ada dua akad yang digunakan yaitu *Murabahah* lalu kemudian *wakalah*. Hal ini adanya perbedaan dengan ketentuan fatwa nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang berbunyi jika bank hendak mawakilkan kepada nasabah kepada pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah adanya barang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi fatwa DSN-MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 terkait proses pembiayaan di BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo Lampung Selatan? dan (2) Bagaimanakah Hukum Ekonomi syariah tentang implementasi fatwa DSN MUI terkait pembiayaan BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo Lampung Selatan?. Adapun metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode kualitatif, *feild research* yang bersifat deskriptif analisis serta data primer didapat dari wawancara kepada pegawai bank pembiayaan rakyat Syariah serta sejumlah nasabah yang sudah melakukan jasa pembiayaan Ultra mikro multi barang di BPRS Metro Madani, sedangkan data sekunder didapat dari hasil penelaahan serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi pembiayaan Ultra mikro multi barang di BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo dalam hal penyediaan barang bank menyerahkan sejumlah uang kemudian melakukan akad *wakalah* untuk pembelian barang, sedangkan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo belum sesuai dengan ketentuan fatwa tentang *Murabahah*, tepatnya pada ketentuan poin sembilan yaitu: jika pihak bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik pihak bank.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murtiana

NPM : 1621030386

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

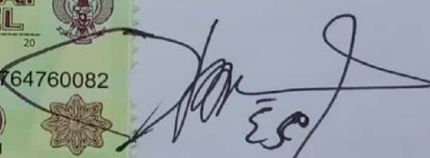
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra mikro yang berdasarkan Prinsip Syariah** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung,
Penulis,

Oktober 2020




Murtiana
NPM. 1621030386



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPEMENTASI FATWA DSN-MUI No.
119/DSN-MUI/II/2018 TENTANG
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Nama : Murtiana
NPM : 1621030386
Program studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Fathul Mu'in, M.H.I
NIP.

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

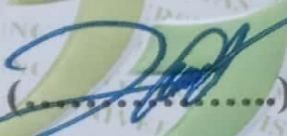
Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **"IMPEMENTASI FATWA DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi pada Bank pembiayaan Rakyat Syariah),** disusun oleh : **Murtiana, NPM 1621030386, Program Studi Muamalah,** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis, 03 Desember 2020**

TIM PENGUJI SIDANG

Ketua : Yufi Yiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Sekretaris : Hasannudin Muhammad, M.H. 

Penguji I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. 

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 

Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairudin, M.H.
NIP. 196201221993031002 

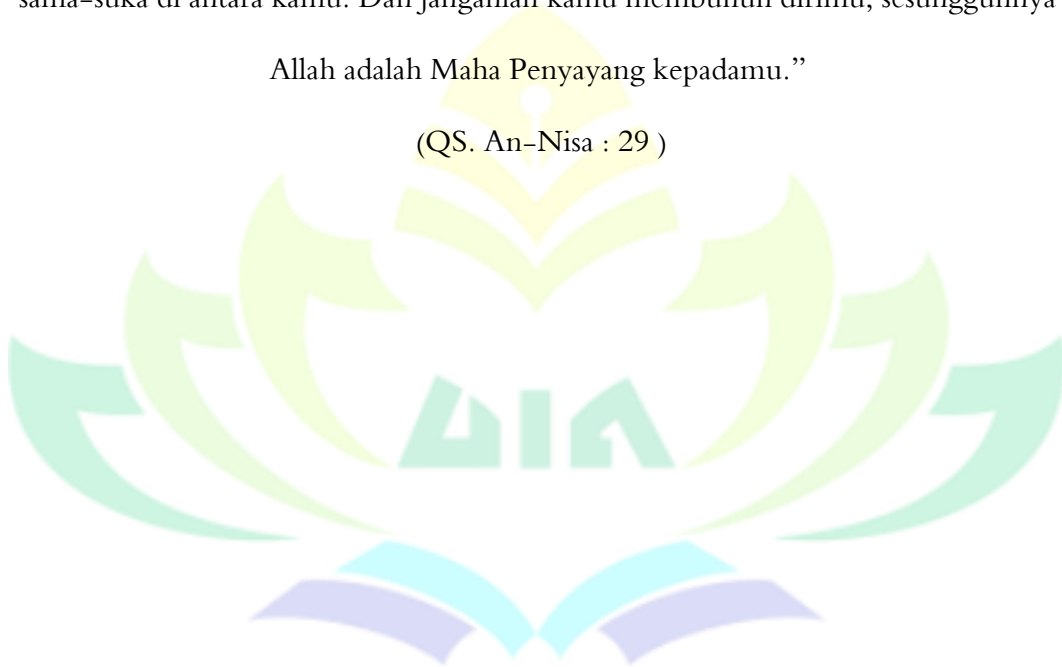
MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Penuh rasa syukur tak terhingga yang telah memberikan saya kekuatan, juga telah menuntun untuk menyelesaikan Skripsi ini, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahandaku tercinta (Kohar Al-Sukohar) dan Ibunda (Samini), terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil yang selalu mendukung dan memotivasi dalam proses pendidikanku sampai kapanpun, lantunanan-lantunan do'a, serta dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah azza wa jalla selalu memberikan keberkahan hidup kepada orangtuaku.
2. Adikku (Mahatir Bintoro) yang memberi dukungan dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Murtiana lahir di Kotanegara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 28 November 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Kohar dan Ibu Samini. Pendidikan penulis dimulai dari SDN 01 Kotanegara, Lampung Utara lulus tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Swasta PP. An-Nuur Negararatu, Lampug Utara lulus tahun 2012, Madrasah Aliyah Swasta PP. Walisongo Bumiratu Nuban, Lampung Tengah lulus tahun 2015, dan pendidikan non formal studi bahasa Inggris, Metro, Lampung tahun 2015, dan kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dimulai pada tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, mengikuti dikegiatan Intra kampus di GEM AIS fakultas syariah UIN raden Intan Lampung, dan Kegiatan ekstra KAMMI (Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia) UIN Raden Intan Lampung, serta ikut dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Volunteer di Rumah Zakat Bandar Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2020

Penulis,

Murtiana
NPM. 16210303886

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum... Bismillahimhmanirrahim.

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan taufik hidayah dan rahmat-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia dan tidak akan tersesat kecuali yang berpegang teguh kepadanya hingga hari akhir yakni Al-Qur'an dan Hadits. Adapun judul skripsi ini "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip syariah (Studi pada BPRS Metro madani cabang Jatimulyo, Lampung Selatan), skripsi ini disusun oleh penulis guna untuk melengkapi salah satu syarat guna untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan beribu-ribu terimakasih. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas syariah Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung yang telah memeberikan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.

3. Ketua Jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I dan sekretaris Juhrotul Khulwah, S.H, M.H jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. Jayusman, M. Ag., dan pembimbing II Fathul Mu'in, M.H.I., yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan memotivasi agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syan'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dan pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan serta seluruh staff akademik dan pegawai yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Kepala serta pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang telah membantu dalam proses penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. Khususnya kelas H Muamalah.
8. Sahabat terbaik The Jombi (Cindy Okta Linda, Eka Kurniasari, Juwita Nur Safitri, Rini Novita Sari, Umi Hasanah, Megaliawati) yang memberikan warna-warni perjalanan perkuliahan dan selalu semangat dalam memotivasi menyelesaikan perjalanan S1 dan berharap akan bersama untuk cerita selanjutnya.
9. Sahabat-sahabat KKN kelompok 190 angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman PPS di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B yang ramah tamah, serta memberikan warna-warni tingkah laku selama PPS.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa serta bantuan yang ikhlas dan amal baik dan semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata saya memohon taufik dan hidayah kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamiin.

Walaikumsalam,

Bandar Lampung,..... 2020

Murtiana
NPM. 1621030386

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ORISINALITAS PENELITIAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	15
b. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	19
c. Rukun dan syarat pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
d. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	24
e. Manfaat dan Tujuan <i>murabahah</i>	31
f. Berakhirnya akad <i>Murabahah</i>	32
g. Aplikasi pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam perbankan	33
B. Tinjauan Pustaka	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Fatwa DSN-MUI 119/DSN-MUI/II/2018.....	44
B. Gambaran Umum Objek	46
1. Sejarah BPRS Metro Madani	46
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani.....	47
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani	48
4. Kepengurusan BPRS Metro Madani	49
5. Produk dan Layanan Jasa BPRS Metro Madani.....	49

C. Mekanisme pembiayaan ultra mikro multi barang di BPRS Metro Madani.....	53
--	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 terkait proses pembiayaan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan.....	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR PUSTAKA

LAPIMRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan memberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan persepsi dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan).”**Pada judul tersebut ditegaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.¹Implementasi yang dimaksud dalam judul ini yaitu pelaksanaan Fatwa DSN-MUI di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah.

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.529.

Pembiayaan ultra mikro yaitu program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam pembiayaan utramikromulti barang atau ultra mikro multi jasa.

Dalam pembiayaan Ultra mikro multi barang boleh dilakukan dengan menggunakan akad jual beli *murabahah* akad salam akad *Istishna* akad *ijarah* dan akad *ijarah muntahiyahbittamlik*. Jika menggunakan akad jual beli *murabahah* wajib tunduk dan patuh pada ketentuan dan pembatasan yang terdapat dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani adalah suatu Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan dengan maksud untuk dapat berperan serta membantu usaha mikro kecil. Lembaga keuangan publik ini berhubungan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menyediakan beberapa akad dalam pembiayaan ultra mikro diantaranya yaitu akad *murabahah*, *ijarah*, dan *dana talangan haji*. Biasa yang digunakan nasabah dalam melakukan pembiayaan ultra mikro multi barang adalah akad *murabahah*.

² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h. 45.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani memiliki empat cabang. Cabang *pertama* di Unit II Tulang Bawang, cabang *kedua* di kecamatan kelirejo, kabupaten Lampung Tengah, Cabang *ketiga* di Daya Asri dari perwakilan Bank Indonesia (BI) provinsi Lampung. Cabang *keempat* di JL. Senopati No. 99 Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan hal ini penulis akan melakukan penelitian pada BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.

Dari penegasan judul tersebut maksud tujuan dari skripsi ini adalah sebuah penelitian akan membahas masalah Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah studi pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih Judul “Implementasi Fatwa MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip Syari'ah (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan)” yaitu;

1. Secara Objektif, Peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan fatwa DSN-MUI No.119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan. Sebab diduga adanya ketidaksesuaian praktik pembiayaan ulta mikro multi barang dengan fatwa DSN MUI No. 119/DSN-MUI/II/218 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

2. Secara Subjektif, Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
 - a. Permasalahan ini belum pernah dibahas pada judul skripsi tahun sebelumnya, terkhusus di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Penelitian ini bermaksud untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan ultra mikro merupakan program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro dalam bentuk konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro maupun pemenuhan kebutuhan, ultra mikro memberikan fasilitas pembiayaan maksimal sepuluh juta pernasabah.³

Dalam hukum Islam utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena didalamnya terdapat pahala yang besar.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt:

³Permenkeu, 95/PMK/05/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah* (Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 181.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqorah : 245)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi. Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani cabang Jatimulyo, Lampung Selatan adalah salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang menyediakan pembiayaan Ultra Mikro yang berupa *multi jasa* dan *multi barang* dengan beragam akad yang digunakan yaitu pada pembiayaan *multi barang*

⁵Bustari Mochtar, et.al. *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Jakarta: KENCANA, 2006), h. 102.

menggunakan akad *Murabahah*, adapun pada pembiayaan *multi jasa* menggunakan akad *Ijarah*, dan *Dana talangan haji*.⁶

Bank pembiayaan rakyat syariah Metro Madani menyediakan pembiayaan ultra mikro multi barang dengan menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam hal initransaksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu perbankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli suatu barang kebutuhannya. Seperti hasil wawancara penulis kepada ibu Ngatini salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan utra mikro multi barang untuk menunjang usaha kelontongnya yakni sebesar Sembilan juta, ia mengatakan bahwa menerima pembiayaan yaitu berupa uang setelah itu ibu ngatini bisa membelanjakannya sesuai dengan kebutuhannya.⁷ Dalam prakteknya perbankan menyelesaikan akad *murabahah* terlebih dahulu kepada nasabah. selama proses akad tersebut tidak terjadi serah terima barang antara perbankan dan nasabah, sebab perbankan juga secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Kemudian saat akad *murabahah* tersebut dilanjutkan baru perbankan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya dengan menggunakan akad wakalah. Sampai sini saja dapat diketahui objek utama yang diterima oleh nasabah adalah uang. Maka

⁶Trianto, wawancara dengan Murtiana, BPRS Metro Madani, Lampung Selatan, 8 Januari 2020.

⁷Ngatini, wawancara dengan Murtiana Metro Madani, Lampung, 20 juni 2020.

hal ini adanya praktik yang berbeda dengan akad *murabahah* yang tercantum pada ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada poin ke-9 yang berbunyi "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank".

Pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang pembiayaan Ultra Mikro multibarang. Akad pembiayaan *murabahah* juga memiliki rukun dan syarat seperti jual beli,⁸ yakni penjual, pembeli, barang yang dijual, dan akad (sighat). Akad *murabahah* merupakan produk yang paling populer dan banyak digunakan oleh perbankan⁹ untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang berprinsip syari'ah seperti bebas dari *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *bathil*. Pembiayaan juga merupakan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang Lembaga Keuangan Syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang yang berkaitan dengan barang dan jasa misalnya, bank memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada nasabah yang bisa digunakan

⁸ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 84.

⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 43.

untuk biaya usaha, pembelian unit barang, pendidikan, biaya perawatan kesehatan biaya bayar pajak kendaraan beroda dua dan biaya lainnya. Sehingga perlu menetapkan suatu Fatwa yang mengatur tentang pembiayaan tersebut, yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berprinsip Syari'ah.

Latar belakang di atas maka menjadi suatu penegas penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Fatwa No.119/ DSN-MUI/ II/2019 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi pada BPRS metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan).*

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini penulis fokus membahas tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan. Fokus penelitian penulis lebih menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan yang sistematis dan subjektif yang akan menghasilkan data deskriptif.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 terkait proses pembiayaan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan ?

2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 terkait proses pembiayaan di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI terkait proses Pembiayaan Ultra Mikro di BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.

G. Signifikasi Penelitian

Disetiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam bagi para pembaca mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 199/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro berprinsip Syari'ah pada BPRS Metro Madani cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan refrensi dan informasi khususnya bagi mahasiwa maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip syari'ah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (*teramati*) yang mempunyai kriteria tertentu yang valid. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian Data dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan pustaka (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari situ.¹⁰ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 119/DSNMUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syri'ah di BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian deskriptif yaitu suatu uraian sistematis tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.¹¹

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsiti: Bandung, 1995), h. 58.

¹¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 36.

Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai proses pembiayaan dan implementasi fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh;

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti atau informan. Data utama penulis laporan bentuk hasil wawancara kepada pegawai Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah (BPRS) serta sejumlah nasabah yang sudah pernah menggunakan jasa pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder didapat dari hasil pengamatan dan hasil penelaahan dokumentasi serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.¹²

3. Teknik Pengumpulan data

¹² Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.105.

Pengumpulan data data dilakukan dalam beberapa setting, berbagai sumber dan berbagai cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam.¹³

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara baik secara terstruktur yang telah tersusun maupun bebas kepada sejumlah informan pada BPRS cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁴ Atau sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Dalam hal ini penulis gunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tentang BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo, Lampung Selatan.

4. Informan penelitian

¹³*Ibid.*, h. 233-234.

¹⁴Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Raden Intan, 2014) hal. 31

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti Dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁵

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Dalam penelitian ini menentukan Informan dengan menggunakan teknik purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentangapa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari BPRS Metro Madani 6 orang, yaitu Winda sebagai customer service BPRS, Edi Darmaji sebagai marketing BPRS, dan 4 nasabah yaitu Ngatini, Rahmat, Ismail Cahyadi, dan Merianto. Nasabah tersebut yang

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 300.

¹⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), h. 54.

melakukan pembiayaan ultra mikro multi barang di BPRS Metro Madanicabang Jatimulyo, Lampung Selatan. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap focus penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 119/DSN-MUI/III/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Setelah data laporan yang berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung penulis dari tempat kejadian¹⁷ sudah terkumpul langkah selanjutnya data tersebut akan dianalisis melalui cara metode kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Cara berfikir induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.¹⁸

¹⁷ Septiawan Santana K., *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), H. 45.

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 121.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa *murabahah* dimbildari kata *rabiha* – *yarhabu* – *ribhan* – *warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *ribh* itu sendiri beratisuatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*).¹ *Murabahah* merupakan masdar dari kalimat *ribhun* yang berarti ziyadah (tambahan).²

Sedangkan *murabahah* secara istilah adalah:

بيع السلعة بثمنها التي قامت به مع بشراء خاصة

“Jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu”

Wabah Zuhaili menjelaskan, *murabahah* adalah:

البيع بمثل الثمن الاول مع زيادة ربح

“Jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan”

Golongan ulama Malikiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan minta keuntungan dari pembeli dan

¹Yadi Yanwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14.

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 83.

perkataan *aku beli barang ini 10 dinar dan berilah aku laba satu atau dua dinar*. Ini merupakan *murabahah*.³

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apasaja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut, namun Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.⁴

Pengertian *Murabahah* dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Menurut Antonio, pengertian *Bai' alMurabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁵ Dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BPRS dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara

³Andri Soematra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 82

⁴Adi Warman A. karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 223.

⁵Osmat Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012), h. 57.

pembayaran cicilan(*bitsamanajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.⁶

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Dalam pembiayaan ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.⁷ Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.⁸ Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Sebagai Contoh, Ny. Hanna memerlukan sebuah mobil senilai Rp 50.000.000.-. jika Bank mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp.

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*...., h. 74.

⁷Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 338.

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*...., h. 27.

6.000.000,- selama 5 tahun maka, harga yang ditetapkan kepada Ny. Hanna adalah Rp 56.000.000,- kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp 1.000.000.- per bulan (diperoleh dari Rp. 36.000.000,- : 36 bulan) kepada Bank.⁹

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁰

Saat ini akad pembiayaan *murabahah* digunakan hampir di semua jenis produk pembiayaan ketimbang akad pembiayaan lainnya.¹¹ Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan. *Pertama*, resiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (*musyarakah* atau *mudhdrabah*). *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.¹²

⁹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 200.

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,,h. 113.

¹¹Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 121.

¹²Yadi Yanwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 14.

b. Landasan Hukum *Murabahah*

1) Landasan hukum dalam Al-Quran

a) QS. An-Nissa 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b) Landasan hukum dalam Hadis Nabi

عن ابي سعيد عن النبي مُحَمَّد ﷺ: التاجر الصدوق الامين مع النبي و
الصديقين و الشهداء (رواه الترميزي)

Artinya: *Sahabat Abi Sa'id Al-khudrira. berkata, bahwa Nabi saw telah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapat kedudukan bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada'. (HR. Tirmidzi)*¹³

c) Ijma' Ulama

Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah*.¹⁴ kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat diajurkan dan merupakan sunah Rosulullah.¹⁵

¹³ Abi 'Isa Muhammad Isa Bin Sauroh At-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi*, No Hadis. 1209, Baitul Afkar Ad-Dauliyah: Yordania.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI NO.119/DSN-MUI/II/2008 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah.

d) Landasan Hukum Positif

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan “bahwa kegiatan usaha Bank umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah”.¹⁶

e) Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.¹⁷

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual-beli biasa, yaitu:

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, bukan termasuk yang diharamkan/dilarang.

¹⁵ Khotibul, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Cet. II(Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2017), h. 104.

¹⁶Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1).

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 265.

- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau barang yang memiliki nilai.
- c) Barang yang diperjualbelikan dimiliki oleh penjual, tidak sah jika menjual barang yang bukan miliknya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، فَقُلْتُ: يَا تَبْنَ الرَّجُلِ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yūsuf bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw., maka aku berkata: Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu. (HR. Tirmizī)

18

- d) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada unsur *gharar*.
- e) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual.

Barang dagang yang tidak berada ditangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan

¹⁸Imam Ḥafīz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratu at Tirmizī, *Jami as Shahih* (Sunan at Tirmizī), Jilid 2, nomor hadis: 1250, *Kitab Buyu* (Maktabah Dahlan: Indonesia) h. 350-351.

ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba.

Contoh: A membeli buku dari B. B belum mengirimkan kepada A atau kepada agennya. A tidak bisa menjual buku kepada C. Jika A menjual sebbelum menerima pengiriman daari B, maka penjualan yang dilakukan oleh A menjadi tidak sah.

f) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau cara-cara komunikasi modern.

Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatannya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal, demikian sebaliknya.¹⁹

g) Tidak membatasi waktu, misalnya “saya menjual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu menjadi milik saya kembali.”²⁰

Dalam literasi yang berbeda para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi:

a) Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.

¹⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 178-179

²⁰Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 46.

- b) Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- c) Modal merupakan *mal musliyyat* (benda yang ada perbandingannya dipasaran) seperti barang yang ditakar, bendang yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan.
- d) *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*.
- e) Akad jual-beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual-beli pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.²¹

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut usmani (1999), antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 85.

akandijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.²²

- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengirriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak daapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan itulah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dinyatakan sah hanya ketika biaya-biaya diperoleh barang yang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.²³

d. Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 83.

²³ *Ibid.*, h. 76.

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang tersebut. Menyediakan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan,

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Murabahah* berdasarkan yang bersifat mengikat, maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli (pembeli tidak dapat membatalkan pesannya).²⁴
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta

²⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37.

uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan.²⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.

1. Ketentuan Umum:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus

²⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syri'ah*, Cet. 1, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 537.

keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.²⁶

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakkan setelah barang secara prinsip menjadi bank.²⁷

2. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- a. Nasabah menyampaikan pengajuan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

²⁶*Ibid.*,

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 24.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak „*urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, wajib melunasi kekurangannya.²⁸

3. Jaminan dalam *Murabahah*

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

²⁸*ibid.*, h. 26

- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Utang dalam *Murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Penundaan pembayaran dan *Murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹

6. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pemesanan, bank syariah dapat meminta uang muka. Berkaitan dengan Akutansi Perbankan Syariah, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah, bukan pada pemasok. Jadi pembayaran terlebih dahulu kepada pemasok, yang lazim disebut dengan pendanaan sendiri (*self financing*) tidak dapat dikategorikan sebagai uang muka, bahkan banyak yang berpendapat barang yang diberi dana sebagian dari nasabah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan pertama, butir 4 yaitu: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.

Bank dapat meminta kepada nasabah (*urbun*) sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunas piutang. Dari sekian ketentuan jual beli *murabahah*, dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) ada

²⁹*Ibid.*, h. 28

dua ketentuan yang sangat erat kaitannya dengan bahasan selanjutnya, yaitu Pasal 119 dan Pasal 120.³⁰

Pasal 119 KHEs menyebutkan bahwa jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Sementara itu, Pasal 120 KHEs menyebutkan bahwa jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau asset, penjual harus membeli terlebih dulu asset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.

e. Manfaat dan Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

1. Bagi Bank, Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.³¹
2. Bagi Nasabah, Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Selain itu bermanfaat untuk menambah modal usaha bagi

³⁰Ibid., h. 30

³¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 205.

pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah. Dan untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS, dan pegawai.³²

Tujuan pembiayaan *murabahah* hanya digunakan dalam situasi yang khusus. Menurut al-Marghinani, adalah

- a. Untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual-beli..
- b. Untuk memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya.³³

f. Berakhirnya Pembiayaan *Murabahah*

1. Pembatalan akad
2. Terdapat cacat, kerusakan , atau aib pada objek barang akan dijual ketika diserahkan kepada penjual
3. Objek hilang atau musnah
4. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *murabahah* telah berakhir baik cara pembayarannya secara *lumsun* (Sekaligus) ataupun secara ansuran.³⁴

³²Meita Sari, “Implementasi workplace Spirituality Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pespektif Ekonomi Islam” (*Skripsi* Program Sarjana Hukum Islam UIN Raden Intan, 2019), h. 87-88.

³³*Ibid.*, h. 205.

³⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, h. 57

sedangkan Akad wakalah akan berakhir karena sebab-sebab seperti berikut:

1. Atas persetujuan paha pihak yang terlibat
2. Diakhiri oleh kedua belah pihak
3. Barang yang menjadi tujuan objek dalam akad wakalah mengalami kerusakan.
4. Meninggalnya salah seorang diantara pemberi kuasa dan penerima kuasa.
5. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

g. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Perbankan

Aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan, yaitu:

1. Penggunaan Akad *Murabahah*
 - a. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transsaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
 - b. Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang akan menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

- c. Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.³⁵
- 2. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli
 - a. Rumah, atau tempat tinggal lainnya.
 - b. Alat transportasi atau kendaraan
 - c. Pembelian barang modal usaha
 - d. Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 3. Bank
 - a. Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank.
 - b. Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
 - c. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual, bukan pada rekening nasabah.
- 4. Nasabah
 - a. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.

³⁵ Ismail, *Op. Cit.*, h. 140-144.

- b. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

5. Supplier

- a. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- b. *Supplier* menjual barangnya kepada bank, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- c. Dalam kondisi tertentu, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase Order* (PO) atas pembelian barang tetap terbitkan oleh bank, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank.

6. Harga

- a. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank dan nasabah tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- b. Harga jual bank merupakan harga jual yang disepakati antara bank dan nasabah.
- c. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*

yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

7. Jangka Waktu

- a. Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam angka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank maupun nasabah.

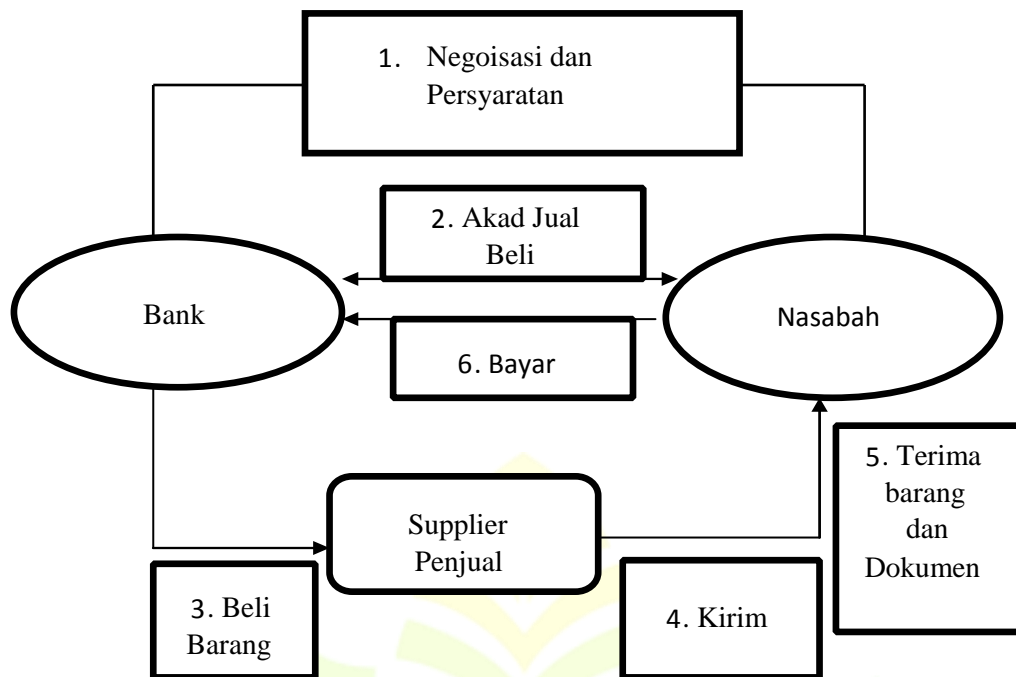
8. Lain-lain

- a. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi

dikelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.

b. Dalam penundaan pembiayaan

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda hutangnya
- 2) Jika nasabah menunggak terus dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran maka penyelesaian sengketa ini dapat dimusyawarahkan, atau di badan arbitrase syariah jika musyawarah tidak dicapai oleh kedua belah pihak.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal ya tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Berikut skema dalam pembiayaan murabahah;



Sumber: Skema Pembiayaan *Murabahah*

Keterangan:³⁶

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

³⁶Perbankan Syariah, *Op. Cit.*, h. 139.

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

B. Tinjauan Pustaka

Penulis membandingkan penelitian terdahulu guna mendukung materi yang akan dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Yessi Rachma Khasanah dengan judul skripsi “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa Di BPRS Al-Salam dan BPRS Patriot Bekasi dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Yessi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian tersebut membahas pengaturan pembiayaan ijarah multijasa dalam fatwa DSN dan SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 dan imlementasi pembiayaan ijarah

multijasa di BPRS Al-Salaam dan BPRS Bekasi. Dalam hasil penelitian ini terdapat perbedaan fatwa DSN-MUI dan SEOJK No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terkait *ujrah* yang harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase, SEOJK No.37/SEOJK.03/2015 menyatakan harus nominal, sedangkan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MU/IX/2017 tentang akad *ijarah* menyatakan bahwa akad *ijarah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Serta Terdapat perbedaan implementasi pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS As-Salaam dan BPRS Patriot. Perbedaan itu terlihat pada tiga hal yaitu; *ujrah*, objeknya, dan cara penyaluran dana ke nasabah, dalam pelaksanaannya akad *ijarah* multijasa di BPRS As-Salaam yaitu pihaknya melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga sehingga telah terjadi manfaat atas jasa tersebut. Berbeda dengan pelaksanaannya di BPRS Patriot Bekasi pihak sekolah tidak mengetahui bahwa dalam transaksinya ada pihak BPRS. Objek yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BPRS Al-Salaam sudah jelas manfaat dari suatu jasa, karena dalam pelaksanaannya BPRS membiayai kepada pihak ketiga dengan cara mentransfer. Sedangkan di BPRS Patriot Bekasi memakai akad wakalah sebagai akad pendukung, sehingga pihak BPRS Patriot Bekasi tidak menyerahkan secara langsung dana kepada pihak sekolah.

Ketentuan *ujrah* dalam fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 dinyatakan bahwa *ujrah/fee* harus berupa nominal bukan persentase, maka

yang tercantum di BPRS Al-Salaam dan BPRS Patriot beksi tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tentang multijasa, karena kedua BPRS tersebut menggunakan presentase.³⁷

Adapun persamaan penelitian yang penulis kaji dengan penelitian yang dilakukan oleh Yessi dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan *marabahan*. Adapun perbedaan antara penelitian saudara Yessi meneliti mengenai pelaksanaan pembiayaan marabahan di BPRS As-Salam dan BPRS Patriots sedangkan penulis yaitu terletak pada obyek penelitiannya yaitu bagaimana implementasi pembiayaan ultra mikro di BPRS Metro Madani.

2. Penelitian Muhamad Fausi Hanif dengan judul penelitian “Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih” peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris, dalam penelitian ini membahas tentang hubungan hukum antar pemberi modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) penerapan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih serta penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT duta jaya simpang randu way seputih. Dengan hasil penelitian bahwa hubungan hukum

³⁷Yessi Rachma Khasanah, “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, (*Skripsi* Program Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah), h. 75-76.

antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Duta Jaya Simpang Randu yaitu penetapan nisbah bagi hasil dilakukan diawal akad, hal ini kurang sesuai antara teori dengan praktek pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *mudharabah* yang diterapkan di BMT Duta Jaya adalah dengan melakukan administrative, penjadwalan kembali (*rescheduling*) persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) atau eksekusi jaminan.³⁸

Adapun persamaan penelitian Muhammad Fauzi dan penulis yaitu membahas mengenai pembiayaan, adapun perbedaannya yaitu pada jenis pembiayaan yang berbeda.

3. Penelitian Budi Triono, dengan judul “Penerapan Fatwa DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* Di BPRS Sukowati Seragen Cabang Grobongan” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dalam skripsi ini membahas mengenai praktek pelaksanaan akad *murabahah* di BPRS sukowati cabang grobongan dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang penerapan DSN-MUI tentang *murabahah* di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobongan. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BPRS Sukowati Seragen abang Grobongan dirasa

³⁸Muhamad Fausi Hanif, “Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih”. (*Skripsi Program Sarjana Hukum, Universitas Lampung, 2017*), h.73-75.

belum sesuai dengan syari'ah. Sebab dalam pembiayaan tersebut pihak BPRS tidak menyediakan barang untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, akan tetapi memberikan uang kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Penerapan fatwa pada BPRS Sukowati Sragen cabang Grobongan belum dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.³⁹

Setelah beberapa karya ilmiah terdahulu penulis kaji ada beberapa persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan berprinsip syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas tentang Implementasi fatwa DSN MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

³⁹Budi Triono, "Penerapan Fatwa DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* Di BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobongan, (*Skripsi* Program Sarjana Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 117-118.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008
- Ansori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dan Lembaga Keuangan dan Perusahaan Keuangan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Arikunto, Suharsimi *Dasar-Dasar Reseach*, Bandung: Tarsiti, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Reseach*, Tarsiti: Bandung, 1995
- Aryanti, Harnida Gigih et. al. *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Budi Triono, "Penerapan Fatwa DSN MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di BPRS Sukowati Seragen Cabang Grobongan, (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, 2017
- Bustari Mochtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: KENCANA, 2006
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Bisnis Rosulullah*, Cet. 4, Semarang: Pustaka Nuun, 2008
- A. Djajuli, *Kaidah-kaidah fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Haryanti, Harnida Gigi Et. Al. *Bank Dan Lembaga Keuangan, Klaten: Cempaka Putih*, 2015
- Hidayat, Eneng. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remeja Rosdakarya, 2016
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Huda, Nurul. Mohamad Heykal, *Lembaga Keungan Islam*, Jakarta: Kencana, 2013

- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- karim, Adi Warman A. karim, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Karsidi, *Ibadah dan Bisnis di BPR Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* , Jakarta: kencana, 2015
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Meita Sari, “Implementasi workplace Spirituality Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pespektif Ekonomi Islam” *Skripsi* Program Sarjana Hukum Islam UIN Raden Intan, 2019
- Mochtar, Bustari, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan lembaga Keuangan lain*, Jakarta: KENCANA, 2006.
- Muhamad Fausi Hanif , “Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih”. *Skripsi* Program Sarjana Hukum, Universitas Lampung, 2017
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muthaher, Osmat. *Akutansi Perbankan Syriah*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012
- Peorwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2010.
- Rivai, Veithzal. Andria PermataVeithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* , Jakarta: Rineka Cipta, 2012

- Septiawan, Santana K. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syri'ah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010
- Sjahdein, Sultan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Anggota Ikapi, 2005
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syrai'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Sovia, Siti et. al. *Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: pusat kurikulum dan perbukuan, 2013), h. 40-41.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet.1. Ed. II, Yogyakarta: Ekonesia, 2004
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah Raden Intan, 2014.
- Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi (CD Kutubus Sittah), *kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti*, Hadits Nomor 1130.
- Umam, Khotibul. Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syriah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Yanwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Yessi Rachma Khasanah, "Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, (*Skripsi* Program Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Yumanita, Ascarya Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Social dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Social dan Pendidikan Teori dan Aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Wawancara

Darmaji, Edi. Wawancara dengan Murtiana, BPRS Metro Madani, Jatimulyo, 15 Juli 2020

Cahyadi, Ismail. wawancara dengan Murtiana, BPRS Metro Madani, Jatimulyo, 18 Juli 2020.

Ngatini, Wawancara dengan Murtiana, BPRSMetro Madani, Jatimulyo, 20 juni 2020.

Trianto, Wawancara dengan Murtiana, BPRS Metro Madani, Jatimulyo, 8 Januari 2020.

Shahrez, Winda. wawancara dengan Murtiana, BPRS Metro Madani, Jatimulyo. 20 Juli 2020.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI no. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Sumber Online

Peraturan Kementrian Keuangan, www.jdih.kemenkeu.go.id (11 November 2019)

Bank syariah Metro Madani, www.banksyariahmetromadani.co.id (17 Juli 2020)